KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Kaji Dana Parpol
Tanggal : Sabtu, 27 Juni 2015
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

DPR Kaji Dana Parpol

Agus Raharjo, Halimatus Sa'diyah

Butuh aturan baru untuk memperjelas sumber penerimaan partai politik.

JAKARTA—DPR akan mengkaji format peningkatan jumlah bantuan dana partai politik yang diajukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemerintah sebelumnya menginginkan rencana tersebut dapat masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

"Kami tidak bisa mengatakan mendukung atau tidak, namun yang pasti, formatnya kami lihat terlebih dahulu," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (26/6). Apabila ada pengaturan bantuan dana parpol, dia menjelaskan, seharusnya disesuaikan dengan batas kelayakan setiap partai. Partai pun bisa berperan penuh sebagai salah satu pilar demokrasi.

Menurutnya, besaran 10 sampai 20 kali lipat yang diusulkan mendagri muncul setelah ada pemberitaan di media massa. Yang pasti, kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, pemerintah belum membahas soal dana bantuan parpol dengan DPR melalui Badan Anggaran (Banggar).

Taufik pun menegaskan, DPR tak pernah mewacanakan bantuan dana parpol tersebut. Wacana ini muncul dari pemerintah. "Yang pertama kali menyampaikan ke publik *kan* pemerintah, kami tidak mengerti urusan apa-apa, jangan pula parpol *digebukin* lagi," kata Taufik.

Wakil Ketua DPR lainnya, Fahri Hamzah, menjelaskan, perlunya aturan mengenai dana untuk parpol sebelum anggarannya ditambah. "Indonesia perlu diatur ketegasan karena tidak bisa parpol tidak diatur sumber pemasukannya," katanya di Jakarta, Kamis (25/6). Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan, keuangan politik harus dikendalikan. Kalaupun bantuan untuk parpol ditingkatkan, harus disertai dengan pengawasan. Sumber pendanaan parpol pun, ujarnya, harus diperjelas.

"Kalau dari pemerintah, tentu kepada pos yang dialokasikan pemerintah, yaitu KPU dan Bawaslu," ujarnya. Untuk sumber pendanaan dari swasta, harus ada rekening khusus yang terdaftar di KPU dan diaudit BPK. Dia mengatakan, apabila 560 legislator tidak diatur cara mendapatkan uang, mereka akan mencari dengan caranya sendiri.

Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate mengatakan, penambahan dana bantuan untuk partai politik tidak tepat saat ini. Menurutnya, dana parpol tak seharusnya dijadikan prioritas. Anggota Komisi XI ini menambahkan, perwakilan pemerintah, yakni Menteri Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), juga belum membahas soal ini dengan DPR. Di rapat badan musyawarah (bamus) DPR juga belum pernah ada pembicaraan kenaikan dana parpol.

Johnny mengatakan, belanja modal pada APBN 2016 harus disalurkan. Pada saat yang sama, APBN hendak memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Adanya dana parpol, tuturnya, bisa menghambat program itu. Sebelum dana parpol ditingkatkan, Johnny meminta evaluasi terhadap manajemen parpol terlebih dahulu. "Saat ini *kan* sudah ada bantuan untuk parpol, diteruskan saja dulu," tegas dia.

Sikap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak sama dengan koleganya di Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Fraksi ini menyetujui peningkatan jumlah bantuan keuangan untuk parpol. "Kami sepakat (kenaikan dana untuk parpol) yang peruntukannya jelas. Selain untuk operasional, administrasi dan kerumahtanggaan, saya usul didorong untuk kaderisasi partai," kata Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding di Jakarta, kemarin.

Selain kaderisasi, dia menjelaskan, anggaran tersebut bisa digunakan untuk penataan struktur, administrasi, dan operasional rutin organisasi. Dana parpol pun dapat memberi dampak bagi sehatnya parpol sehingga berdampak langsung bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. "Kalau kenaikannya 20 kali, berarti sekitar Rp 2.000-an per suara, saya kira sudah dapat membantu," ujarnya.

Mendagri Tjahjo Kumolo sebelumnya mengungkapkan, dana parpol senilai Rp 108 per suara sangat minim. Dana tersebut diusulkan untuk ditambah menjadi 10 hingga 20 kali lipat. Data Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri menyebutkan, total bantuan yang diberikan kepada 10 partai politik yang lolos dalam Pemilu 2014 senilai Rp 13,17 miliar dalam APBN 2015.

Tjahjo menjelaskan, draf usulan tersebut telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo melalui Sekretariat Negara. Istana belum merespons usulan mendagri tersebut. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku tak tahu soal dana bantuan parpol yang diusulkan naik 10 kali lipat. "Mungkin Presiden tahu, tapi saya tidak tahu," kata dia.

ed: a syalaby ichsan

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Uang Rakyat Harus Digunakan Efektif

Halimatus Sa'diyah, Agus Raharjo

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta peningkatan dana bantuan untuk partai politik (parpol) dikaji ulang. Wakil Ketua KPK Zulkarnain menilai, penambahan dana bantuan tersebut belum diperlukan.

"Menurut saya, ini perlu pengkajian, tidak bisa sesederhana begitu. Harusnya, uang rakyat itu digunakan seefektif mungkin," katanya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/6). Sebelum dana parpol ditambah, Zulkarnain menilai, parpol harusnya berbenah terlebih dulu. Baik pembenahan di tingkat organisasi, maupun pembenahan integritas para kadernya. Menurut Zulkarnain, pembenahan tersebut penting agar dana bantuan parpol nantinya tak dikorupsi.

Di sisi lain, Zulkarnain memandang bahwa selama ini biaya politik terlalu tinggi. Padahal, katanya, jika partai memiliki program bagus dan didukung dengan kader-kader yang berintegritas maka rakyat pasti akan memilih mereka. "Jadi tidak usahlah hambur-hamburkan uang begitu besar," ucapnya.

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, pemerintah perlu melakukan beberapa hal sebelum merealisasikan dana parpol. Pertama, pemerintah harus memastikan manajemen pengelolaan keuangan parpol berjalan baik.

Kedua, pemerintah juga harus memastikan mekanisme pertanggungjawaban keuangan parpol. "Ketiga, pemerintah juga harus menyiapkan mekanisme audit dan kontrol dari penggunaan dana bantuan parpol," kata Arya kepada *Republika*, kemarin.

Selanjutnya, pemerintah harus melakukan kajian faktor kenaikan dana bantuan parpol. Selama ini, dia menjelaskan, faktor besaran pemberian dana berdasarkan perolehan suara. Setelah empat hal itu dipastikan, pemerintah dapat merealisasikan pemberian dana bantuan parpol ini. Bantuan dana parpol, ujarnya, juga harus dibarengi dengan konsekuensi jika terjadi penyalahgunaan dana parpol ini. "Pemerintah memberi alokasi dana banyak tapi kalau terungkap korupsi harus ada konsekuensinya," tegas Arya.

Dalam sensus CSIS, setiap DPD parpol membutuhkan dana sekitar Rp 5 juta tiap bulan. Jika dihitung seluruh DPD seluruh Indonesia yang berjumlah 514 Kabupaten/Kota, berarti setiap bulan butuh Rp 30 miliar setiap tahun.

ed: a syalaby ichsan